

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jalan Karya Utama No. 4

Nomor Telepon : 7951076

*Website* : [diskopukm.deliserdangkab.go.id](http://diskopukm.deliserdangkab.go.id)

*E-mail* : [diskopds@gmail.com](mailto:diskopds@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas. Meskipun demikian DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

LUBUK PAKAM , Februari 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG



ADELA SARI LUBIS, S.Tr. Keb., M.K.M  
NIP. 19711111 199303 2 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>6</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n .....	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	9
<b>BAB III.....</b>	<b>17</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	17
3.1.1 Skala Capaian Kinerja .....	18
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	18
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	20
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	22
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	23

3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	27
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. ....	28
3.2	Realisasi Anggaran .....	41
BAB IV	.....	45
PENUTUP	.....	45

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b>	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n .....	4
<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis .....	6
<b>Tabel 2.2</b>	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n .....	7
<b>Tabel 2.3</b>	Rencana Kinerja Tahun n .....	9
<b>Tabel 2.4</b>	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah .....	10
<b>Tabel 2.5</b>	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n .....	11
<b>Tabel 3.1</b>	Pengkategorian Capaian Kinerja .....	18
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n .....	18
<b>Tabel 3.3</b>	Perbandingan Capaian Kinerja .....	20
<b>Tabel 3.4</b>	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	22
<b>Tabel 3.6</b>	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	23
<b>Tabel 3.7</b>	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	28
<b>Tabel 3.8</b>	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	29
<b>Tabel 3.9</b>	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	41

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Struktur Organisasi.....	3
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH :

### **1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan BUPATI Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH mempunyai tugas :

Membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

[illegible]

3

### 1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH :

**Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2022	Rp 8.423.819.762
APBD	Tahun 2023	Rp 8.888.202.085

Sumber : DPPA T.A 2022 dan DPPA T.A 2023

### 1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

## **1.4 Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023 adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH adalah meningkatkan kinerja koperasi dan usaha mikro. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	64.25	65.04	67.5	70
	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	81.24	83.07	85.33	85.79
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	85	86
	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82	84	86	88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		daerah					

Sumber : Cascading DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023 :

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	1.1 Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Prosentase	Usaha mikro yang berhasil meningkatkan penjualan dan/ atau modal ke kriteria di atasnya	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas / Total Usaha Mikro Naik Kelas *100%	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	2.1 Persentase Koperasi Aktif	prosentase	Menggambarkan perbandingan kondisi koperasi aktif dengan	Persentase Koperasi Aktif / Total	Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					koperasi yang terdata yang ada di Kabupaten Deli Serdang	Koperasi *100%	dan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Hasil Survei	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	3.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	poin	Penilaian yang dilakukan terhadap Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Hasil Survei	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pemerintah.		

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	prosentase	64.25
	Meningkatkan	1.2	Meningkatnya	Persentase	prosent	81.24

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	n Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro		Koperasi Aktif	Koperasi Aktif	ase	
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	80
	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	poin	82

Sumber : Rencana Kerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tahun 2023

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	64.25
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	81.24
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
4	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82



Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan	80
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan	78
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	31
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	5

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Olahraga Lengkap	0
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	41
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	46
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	8
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1176
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor	100
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	0
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	6

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	1
1.5.4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat Operasional	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	240
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon/ Internet, Air dan Listrik	4
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor	6
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	3
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung dan Halaman	1300
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	350
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	30

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	35
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	10
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	25
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengelola yang bersertifikat	50
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahuan tentang perkoperasian	40
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan	25

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Perkoperasian	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	30
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Koperasi Yang Meningkat	50
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	JUMLAH USAHA MIKRO BARU	60
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	645
6.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100
6.1.2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	440

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80
6.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	160
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Skala Usaha	60
7.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	145

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	64.25	62.41	97.14	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2	Meningkat	Persentase	81.24	80.90	99.58	Sangat	Bidang



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	nya Koperasi Aktif	Koperasi Aktif				Tinggi	Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	86.04	107.55	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82	78.22	95.39	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sumber : *Capaian IKU Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Persentase Usaha Mikro Naik Kelas, realisasi sebesar 62.41% dan memperoleh nilai capaian sebesar 97.14% dari target. Usaha mikro yang berhasil meningkatkan penjualan dan/ atau modal ke kriteria diatasnya dengan parameter usaha mikro tersebut sudah memanfaatkan teknologi, menggunakan sistem pemasaran online, memiliki legalitas

usaha, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki *packaging* (kemasan) yang menjual, fokus kepada pelayanan dan adaptif. Kemudian untuk evaluasi terhadap indikator Persentase Koperasi Aktif, realisasi sebesar 80.90% dan memperoleh nilai capaian sebesar 95.58% dari target. Hasil ini diperoleh dari persentase koperasi aktif dibagi total koperasi dikali 100%. Evaluasi ini menggambarkan perbandingan kondisi koperasi aktif dengan koperasi yang terdata yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Parameter ini digunakan untuk menurunkan pinjaman-pinjaman yang menjamur dimasyarakat dengan bunga yang tinggi. Sedangkan yang disebut sebagai koperasi aktif yakni koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Kemudian untuk evaluasi terhadap survey indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, diperoleh realisasi 86.04%. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang diberikan diawal Tahun 2024 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang. Dan evaluasi indikator kinerja yang terakhir yaitu Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, dimana realisasi yang diperoleh sebesar 78.22. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2022 yang diberikan di Tahun 2023.

### **3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	n/a	62.62	63.06	64.25	62.41	97.14
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	76.47	77.11	77.5	81.24	80.90	99.58
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.94	83.38	79.87	80	86.04	107.55
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	81.07	84.61	82	78.22	95.39

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian penjelasan tabel :

Realisasi Kinerja tiap indikator kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 hampir mencapai 100% dari target, dan mengalami peningkatan untuk capaian kinerja di beberapa indikator kinerja walaupun ada indikator yang capaian kinerjanya tidak signifikan meningkat, tetapi tetap melampaui dari yang ditargetkan.

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH periode 2022-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	62.41	64.25	97.14
2	Menignkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	80.90	81.24	99.58
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.04	80	107.55
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78.22	82	95.39

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian penjelasan tabel :

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis sangat tinggi walaupun tidak mencapai 100% tetapi angka pada capaian sudah menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah berjalan dengan baik.

### **3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	64.25	62.41	97.14	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan, adapun hasil ini diperoleh dari beberapa kriteria yaitu : Legalitas Usaha, Pemasaran, SDM Berkualitas, Pembiayaan Modal.	Adapun solusi yang dilakukan yaitu : 1. Dinas Koperasi DAN ukm Kabupaten Deli Serdang membantu fasilitasi legalitas Usaha UMKM Deli Serdang seperti : NIB (Nomor Induk Berusaha), SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), Halal, BPOM dan HAKI. 2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang membantu

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>fasilitasi pemasaran produk UMKM di Deli Serdang melalui pemasaran offline di Pojok UKM Deli Serdang dan online di <a href="http://www.deliserdangmall.com">www.deliserdangmall.com</a> serta promosi produk UMKM Deli Serdang ke Tribun Medan, Radio DSB Lubuk Pakam dan Pameran/ Bazar baik dalam daerah maupun luar daerah.</p> <p>3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan pelatihan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan pada UMKM Deli Serdang baik dari Dinas Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Kementerian.</p> <p>4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang membantu UMKM mendapatkan akses permodalan dengan bekerjasama</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dengan pihak Bank, hal ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi KUR kepada UMKM Deli Serdang.
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	81.24	80.90	95.58	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Deli Serdang yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Beberapa diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman pengurus untuk menyusun laporan keuangan koperasi	Adapun solusi yang dilakukan yaitu : 1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang membantu memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada pengurus koperasi melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi 2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan Surat Himbauan kepada seluruh Gerakan Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya selambat-lambatnya 6 bulan setelah tutup buku. 3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Serdang memberikan Penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berkeinginan mendirikan koperasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan koperasi baru.</p> <p>4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi se-Kabupaten Deli Serdang. Buku Panduan ini diberikan kepada Gerakan Koperasi untuk dipedomani.</p>
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	86.04	107.55	Faktor Keberhasilan: Melakukan Peningkatan Disiplin Aparatur, Pelayanan Kedinasan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai LHE AKIP Perangkat	82	78.22	95.39	Faktor Keberhasilan: Melakukan	



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan kinerja perangkat daerah	Daerah				pendampingan dan koordinasi dengan tim satgas AKIP yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan, RKA-PD, Perjanjian Kinerja, dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian penjelasan tabel :

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja untuk lebih memaksimalkan pencapaian kinerja yang masih dibawah 100%. Namun demikian, capaian indikator kinerja tersebut sudah sangat tinggi dan sangat baik.

### 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisa si	% Capai an	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	64.25	62.41	97.14	2.284.292.240	1.559.998.456	68.29	
2	Persentase Koperasi Aktif	81.24	80.90	99.58	604.082.052	406.281.411	67.26	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	86.04	107.5 5	1.250.564.006	969.560.591	77.53	
4	Nilai LHE AKIP  Perangkat Daerah	82	78.22	95.39	4.749.263.787	3.866.619.445	81.42	

Sumber : *Capaian IKU dan Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel:

Seluruh target kinerja dapat dilaksanakan dengan baik didukung dengan pagu anggaran yang memadai. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jarang menemukan permasalahan yang berarti.

### **3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat nya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangk at Daerah	100	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Jumlah Kegiatan	81.48	Menunjang	
a				Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggar an	100	Menunjang	
-				Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n	100	Menunjang	
-				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	
b				Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminstras i dan Pelaporan Keuangan	100	Menunjang	
-				Penyediaan	Jumlah	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN			
-				Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100		
c				Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	-	-	
-				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa nnya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	-	-	
d				Administras i Umum Perangkat Daerah	Persertase Ketersediaa n Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	Menunjang	
-				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor	100	Menunjang	
-				Penyediaan Peralatan	Jumlah Peralatan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Perlengkap an Kantor	dan Perlengkap an Kantor			
-				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100	Menunjang	
-				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	100	Menunjang	
-				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	100	Menunjang	
-				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100	Menunjang	
-				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	100	Menunjang	
-				Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	Menunjang	
e				Pengadaan Barang	Persentase Pemenuhan	33.33	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana Gedung Kantor			
-				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	-	-	
-				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	33.33	Menunjang	
-				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	-	-	
-				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat Operasional	-	-	
f				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	55.55	Menunjang	
-				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon/ Internet, Air dan Listrik	66.67	Menunjang	
-				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor	100	Menunjang	
g				Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100	Menunjang	
-				Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung dan Halaman	100	Menunjang	
-				Pemelihara an/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	100	Menunjang	
-				Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional			
2	Meningkatnya Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	100	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	100	Menunjang	
a				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	100	Menunjang	
-				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan	-	-	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			
-				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Kinerja	100	Menunjang	
3	Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	100	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	100	Menunjang	
a				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
-				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100	Menunjang	
4	Meningkat nya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Pengelola yang bersertifikasi	100	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengelola yang bersertifikat	-	-	
a				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahuan tentang perkoperasian	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	-	
5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100	Menunjang	
a				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Koperasi Yang Meningkat	100	Menunjang	
-				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen , Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen , Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			
6	Meningkat nya Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah Usaha Mikro Baru	100	PROGRAM PEMBERDA YAAN USAHA MENENGA H, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	JUMLAH USAHA MIKRO BARU	100	Menunjang	
a				Pemberday aan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayak an	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
-				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100	Menunjang	
-				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100	Menunjang	
-				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	Menunjang	
-				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kepentinga n dalam Pemberday aan Usaha Mikro	Sinkronisas i dengan Para Pemangku Kepentinga n dalam Pemberdaya an Usaha Mikro			
7	Meningkat nya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	100	PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	100	Menunjang	
a				Pengemban gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkata n Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Peningkata n Skala Usaha Usaha	100	Menunjang	
-				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengemban gan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran,	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengemban gan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran, SDM, serta	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				SDM, serta Desain dan Teknologi	Desain dan Teknologi			

Sumber : *Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel:

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dengan pagu yang mendukung. Kemudian, Semua program dan kegiatan sangat menunjang tercapainya target kinerja, beberapa capaian target kinerja pada sub kegiatan masih kecil dikarenakan adanya *self blocking* anggaran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Namun demikian tidak menjadi hambatan yang serius bagi pelaksanaan operasional maupun pelaksanaan teknis Perangkat Daerah.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.999.827.793	4.836.180.036	80.61

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.127.310	58.769.310	82.63
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.678.136.477	3.807.850.135	81.40
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.750.000	0	0
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694.096.816	509.815.548	73.45
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.500.000	24.000.000	76.19
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.498.190	227.116.848	93.27
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.719.000	208.628.195	88.88
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	119.395.355	56.157.617	47.04
-	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	119.395.355	56.157.617	47.04



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten/ Kota			
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.241.088	33.226.088	99.95
-	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.241.088	33.226.088	99.95
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	451.445.609	316.897.706	70.20
-	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	451.445.609	316.897.706	70.20
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.171.458.212	844.495.796	72.09
-	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	1.171.458.212	844.495.796	72.09

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Para Pemangku Kepentingan			
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.112.834.028	715.502.660	64.30
-	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.112.834.028	715.502.660	64.30

Sumber : *Realisasi Fisik Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel:

Ada 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH yang telah terealisasi dengan baik dan mencapai target kinerja yang memuaskan. Namun terdapat 1 (satu) anggaran kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 50% tetapi target kinerjanya tetap tercapai mendekati 100% karena kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya *self blocking* pada Tahun 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan seluruh sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH tidak ada yang terlalu signifikan, namun terdapat penghambat dilingkup eksternal yaitu terbatasnya permodalan dan sarana prasarana produksi yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi penghambat dalam pengembangan usaha.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral, maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran.
2. Mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan.
3. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait.
4. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan.
5. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya.
6. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

LUBUK PAKAM , Februari 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG



ADELA SARI LUBIS, S.Tr. Keb., M.K.M  
NIP. 19711111 199303 2 010

## Lampiran 1, Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. RABIATUL ADAWIYAH LUBIS, M.Pd  
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASHARI TAMBUNAN  
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakem, 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

  
  
ASHARI TAMBUNAN

  
  
Dra. Hj. RABIATUL ADAWIYAH LUBIS, M.Pd  
NIP. 19630914 199203 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas.	1. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas.	64,25%
2.	Meningkatnya Koperasi Aktif.	2. Persentase Koperasi Aktif.	81,24%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 6.221.836.033	APBD
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 122.050.355	APBD
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 34.621.088	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 418.585.569	APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Rp. 1.152.618.212	APBD
6	Program Pengembangan UMKM	Rp. 554.490.828	APBD

Lubuk Pakam,

2023



## Lampiran 2, Indikator Utama Kinerja Tahun 2023

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas}}{\text{Total Usaha Mikro Naik Kelas}} \times 100\%$	64,25%
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$	81,24%
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Survey	82 Point
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey	80 Point



KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

Dr. H. RABIATUL ADAWIYAH LUBIS, M. Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630914 199203 2 006



### Lampiran 3, LHE SAKIP Tahun 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514  
Telepon (061) - 7951646 Faks. (061) - 7951646  
E-mail : inspektordeliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 11 - 8 - 2023

Nomor : 700.1.1 / LHE-SAKIP. 32. 29 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : (1) Satu Berkas  
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (SAKIP) pada Dinas  
Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Tahun 2022**

Kepada

**Yth Kepala Dinas Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Deli Serdang**

di-  
Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan berpedoman Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIFI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. PENDAHULUAN

##### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 094/DI/110/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

##### b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada



### C. PENUTUP

#### a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2022 masuk dalam kategori **sangat baik** dengan predikat **BB (78,22)**. Meski sudah mendapat kategori memuaskan, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, seperti Perencanaan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

#### b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Mengetahui  
Inspektur Kabupaten Deli Serdang



**H. Edwin Nasution, SH, M.Si, CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741221 199803 1 010

Petugas Revisi,

1. Gita Priscilia Pinem, SH, M. Hum  
Nip. 198203122005022002
2. Jumiyati, SE  
Nip. 198310072011032001
3. Joko Susilo, SH  
Nip. 19811226 201101 1 010
4. Samuel Pardamean Sinaga, SE, M.Si  
Nip. 198103192003121005



Tembusan disampaikan Kepada:  
1. Yth. Bpk. Bupati Deli Serdang

Lampiran 4, Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

**HASIL PENGOLAHAN DATA SKM TAHUN 2023**

NRR Per Unsur			
No.	Unsur Pelayanan	Actual Masyarakat	
		Indeks Konversi	Mutu
1.	Persyaratan Pelayanan	3.475	A
2.	Prosedur Pelayanan	3.310	B
3.	Waktu Pelayanan	3.277	B
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3.322	B
5.	Produk Jenis Layanan	3.345	B
6.	Kompetensi Pelaksana	3.376	B
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.610	A
8.	Sarana dan Prasarana	3.409	A
9.	Penanganan Pengaduan, Saran	3.789	A

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**  
**TAHUN 2023**

**NILAI IKM**

86.04

**RESPONDEN**

- Jumlah : 52
- Pekerjaan :
  - PNS/TNI/POLRI : 7
  - Pegawai Swasta : 10
  - Wiraswasta/Usahawan : 12
  - Pelajar/Mahasiswa : 8
  - Lainnya : 15
- Jenis Kelamin :
  - Laki-laki : 34
  - Perempuan : 18
- Pendidikan :
  - SD : 2
  - SLTP : 3
  - SLTA : 18
  - D1-D2-D3 : 8
  - S1 : 15
  - S2 : 6
- Umur :
  - 25 - : 12
  - 26 - 35 : 11
  - 36 - 45 : 21
  - 46 - 60 : 8
  - 61 + : 0

PERIODE SURVEI

**B (Baik)**